

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Globalisasi telah menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam dunia bisnis saat ini. Banyaknya perusahaan yang melakukan operasi bisnis di luar negaranya menunjukkan arah perkembangan operasi bisnis yang bersifat global dan merupakan efek dari adanya globalisasi. Galobalisasi juga dapat dilihat dengan semakin banyaknya kerjasama komunitas internasional yang dilakukan oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Kerjasama tersebut diantaranya *World Trade Organization (WTO)*, dan *International Organization of Securities Commissions (IOSOC)*, *North American Free Trade Agreement (NAFTA)*, *ASEAN Federation of Accountants (AFA)*, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*,

Globalisasi juga berdampak terhadap hal-hal yang dahulunya merupakan kewenangan dan tanggung jawab tiap negara, selanjutnya akan dipengaruhi oleh dunia internasional. Demikian pula dengan pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Suatu standar akuntansi memberikan gambaran yang jelas dan konsisten kepada pemegang saham, membuat laporan perusahaan lebih dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan. Standar akuntansi yang dapat diperbandingkan sangat diperlukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, juga oleh para pengguna laporan keuangan yang ingin mengevaluasi kinerja perusahaan skala global dan untuk membantu pengambilan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan sekuritas. Operasi bisnis dan pasar modal yang berkembang saat ini yang sudah mengarah ke internasional, tidak didukung oleh akuntansi dan pelaporannya karena akuntansi dan



pelaporannya masih berorientasi lokal, sehingga setiap negara berbeda-beda pula akuntansi dan pelaporannya. Karena itulah dituntut adanya standar yang bersifat global atau bersifat internasional, karena aturan-aturan akuntansi yang bersifat lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan bisnis dan keuangan internasional. Oleh karena kebutuhan akan standar yang bersifat global/ internasional inilah kemudian harmonisasi akuntansi menjadi isu hangat.

Choi dan Meek (2008) menyatakan bahwa harmonisasi adalah proses peningkatan keterbandingan praktik akuntansi dengan menetapkan batasan pada perbedaan yang ada. Standar harmonisasi ini bebas dari konflik logika dan dapat meningkatkan komparabilitas (daya banding) informasi keuangan yang berasal dari berbagai negara. Harmonisasi standar akuntansi internasional berarti proses meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi melalui penyusunan batasan berbagai macam perbedaan. Harmonisasi akuntansi dianggap akan memberikan banyak keuntungan pada banyak aspek seperti penilaian investasi, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan lainnya. Tidak hanya itu, kos modal akan turun karena berkurangnya risiko untuk investor (Nobes, 2008).

Walaupun harmonisasi akuntansi memberikan banyak keuntungan tetapi harmonisasi akuntansi ini tidak mudah untuk diterapkan karena ada banyak hal yang menjadi penghambat. Nobes (2008) menyatakan bahwa besarnya perbedaan praktik akuntansi di negara yang berbeda akan menjadi penghambat utama. Penghambat lainnya adalah kurangnya agen regulasi internasional. Selain itu, kondisi ekonomi tiap negara yang berbeda juga menjadikan penerapan harmonisasi akuntansi susah untuk sepenuhnya sama.

Harmonisasi akuntansi berkembang dari tahun ke tahun. Pada tahun 1973 IASC dibentuk. IASC kemudian menyusun *International Accounting Standards (IAS)*. Pada tahun 2001 IASC diganti dengan membentuk IASB. IASB kemudian membuat IFRS (*International*



*Financial Reporting Standards*) sebagai standar akuntansi. Tujuan pembuatan standar ini sejalan dengan harmonisasi akuntansi, yakni agar laporan keuangan dari berbagai negara yang berbeda dapat diperbandingkan.

Di Indonesia, IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) mulai melakukan harmonisasi sejak tahun 1994 kemudian berlanjut dengan adaptasi dan adopsi demi kepentingan konvergensi ke IFRS. Indonesia yang mulanya berbasis US GAAP kini beralih menjadi berbasis IFRS. IFRS di Indonesia diterapkan dengan cara konvergensi. Konvergensi merupakan jalan untuk melakukan *full adoption*. Menurut Baskerville (2010), konvergensi berarti juga harmonisasi atau standarisasi, sehingga konvergensi IFRS bermakna proses untuk mengubah standar yang sudah ada (PSAK) menuju IFRS. Strategi konvergensi IFRS ada dua, yakni *big bang* dan *gradual*. *Big bang* cenderung dilakukan oleh negara maju dimana IFRS diadopsi secara penuh sekaligus. Sementara negara berkembang seperti Indonesia menggunakan strategi *gradual*, dimana adopsi IFRS dilakukan secara bertahap.

IFRS dianggap sebagai standar akuntansi yang lebih unggul dibanding US GAAP. Selain dari sisi keterbandingan, IFRS diklaim mampu meningkatkan keterandalan dan menghasilkan informasi keuangan berkualitas tinggi dimana salah satu indikator laporan keuangan berkualitas tinggi adalah rendahnya tingkat manajemen laba. IFRS dipercaya sebagai standar yang mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, alasannya adalah bahwa IFRS menghilangkan alternatif-alternatif akuntansi yang diperbolehkan dan mungkin dilakukan oleh manajemen. IFRS diharapkan dapat membatasi *managements discretion* atau keleluasaan manajemen untuk memanipulasi laba. Namun, apakah hal tersebut sepenuhnya benar? IFRS mendukung *conformity* di seluruh dunia serta meningkatkan *comparability*, *understandability*,



dan penyajian data keuangan. Akan tetapi, IFRS memiliki beberapa keterbatasan dan mungkin mengundang perhatian khusus ketika kita mengingat tentang manajemen laba.

Manajemen Laba merupakan pelaporan keuangan yang tidak netral dimana manajer secara sengaja melakukannya untuk memperoleh keuntungan pribadi (Schipper,1989). Barth *et al.*, (2008) menyatakan bahwa sebuah standar internasional meningkatkan pelaporan keuangan ketika memperkecil kesempatan manajemen untuk menentukan jumlah nilai akuntansi atau manajemen laba. Manajemen Laba terjadi ketika manajer menggunakan *judgment* (pertimbangannya) dalam pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menyesatkan para *stakeholders* (pihak yang berkepentingan) mengenai kinerja ekonomik yang melatar belakangi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil dari perjanjian yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Healy dan Wahlen, 1999).

Dechow dan Skinner (2000) melakukan penelitian mengenai kemungkinan terjadinya intervensi pihak manajemen dalam proses pembuatan laporan keuangan. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa campur tangan manajemen dalam pembuatan laporan keuangan tidak saja melalui estimasi dan metode akuntansi yang digunakan, tetapi juga melalui keputusan operasional. Menurut Healy dan Wahlen (1999), manajemen laba dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain mempengaruhi persepsi pasar saham, meningkatkan kompensasi manajemen, mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian, dan untuk menghindari intervensi regulasi. Menurut Degeorge *et al.*, (1999), manajemen laba muncul dari suatu permainan pengungkapan informasi yang harus dimainkan oleh eksekutif dan *outsiders* (non eksekutif).

Jiraporn *et al.*, (2008) membagi cara pemahaman *earnings management* menjadi dua, yaitu *earnings management* dapat bersifat *opportunistic* dan *beneficial*. Manajemen Laba

dikatakan *beneficial* atau bermanfaat karena meningkatkan nilai informasi laba dengan menyampaikan informasi pribadi perusahaan kepada *stockholders* (pemegang saham) dan masyarakat. Sedangkan manajemen laba dikatakan sebagai tindakan yang bersifat *opportunistic* apabila insentif manajer dan pemegang saham yang tidak terarah merangsang manajer untuk menggunakan fleksibilitas yang diberikan oleh akuntansi yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU) atau *generally accepted accounting principles* (GAAP) guna mengatur laba, sehingga menciptakan distorsi dalam laba yang dilaporkan.

Fenomena praktik-praktik manajemen laba dapat dilihat tidak saja di Indonesia tetapi juga di luar Indonesia. Praktik manajemen laba yang terjadi di luar Indonesia, dapat dilihat contohnya pada kasus Enron Corporation di Amerika Serikat yang memanipulasi laporan keuangan perusahaan dengan mencatat keuntungan 600 juta dollar AS yang kenyataannya perusahaan tersebut sedang mengalami kerugian. Manipulasi ini terjadi karena keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor.

Sedangkan di Indonesia sendiri praktik manajemen laba dapat dilihat pada kasus PT. Kimia Farma, PT. Ades Alfindo, dan PT. Indofarma. Menurut Siaran Pers Bapepam pada hari Jumat 27 Desember 2002, Bapepam menyatakan terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT. Kimia Farma. PT. Kimia Farma sebagai salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia telah melakukan audit pada tanggal 31 Desember 2001. Manajemen kimia farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp. 132 miliar dan laporan tersebut telah diaudit oleh Hans Tuanakotta dan Mustafa (HTM). Akan tetapi Bapepam menyatakan bahwa terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT. Kimia Farma. Sehingga dampak dari kesalahan tersebut adalah mengakibatkan *overstated* (penilaian lebih tinggi) laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp. 32,7 miliar (Bapepam, 2002).

Praktik manajemen laba dilakukan juga oleh PT. Ades Alfindo. Kasus ini terungkap pada tahun 2004 ketika manajemen baru PT. Ades Alfindo menemukan inkonsistensi pencatatan atas penjualan periode 2001-2004. Perubahan manajemen baru ini terjadi pada Juni 2004 dengan kepemilikan saham sebesar 65,07%. Inkonsistensi pencatatan terjadi antara 2001 dan kuartal kedua 2004. Hasil penelusuran menunjukkan untuk setiap kuartal, angka penjualan lebih tinggi antara 0,6-3,9 juta galon dibandingkan dengan angka produksi. Hal ini tentu tidak logis karena tidak mungkin orang menjual lebih banyak dari yang diproduksi. Manajemen PT. Ade Alfindo yang baru melaporkan angka penjualan riil pada tahun 2001 diperkirakan lebih rendah Rp. 13 miliar dari yang dilaporkan. Pada 2002, perbedaannya mencapai Rp. 45 miliar sedangkan untuk tahun 2003, selisihnya kira-kira hampir Rp 2 miliar. Kesalahan tersebut luput dari pengamatan publik karena PT Ades Alfindo tidak memasukkan volume penjualan dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Akibatnya laporan keuangan yang disajikan PT. Ades Alfindo pada tahun 2001 sampai tahun 2004 mengalami *overstated* (dinilai lebih tinggi dari yang seharusnya).

Kasus praktik manajemen laba lainnya juga dapat dilihat pada kasus PT. Indofarma. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam ditemukan bukti bahwa PT. Indofarma melakukan *overstated* (penyataan yang terlalu tinggi) terhadap nilai barang dalam proses yang seharusnya disajikan pada tahun buku 2001 adalah sebesar Rp 28,87 miliar. Akibatnya terjadi *overstated* persediaan sebesar Rp 32,87 miliar. Harga pokok penjualan disajikan terlalu rendah (*understated*) sebesar Rp. 28,8 miliar dan laba bersih disajikan lebih tinggi (*overstated*) dengan nilai yang sama.

Kasus-kasus praktik manajemen laba yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa metode dan standar akuntansi yang berlaku selama ini ternyata masih belum bisa membatasi tindakan oportunistik pihak manajemen yang mencari keuntungan pribadi. Akhirnya angka laba

yang tertera dalam laporan keuangan tidak sebagaimana adanya dan menyesatkan keputusan para investor. Karena itulah konvergensi IFRS diImplementasikan agar dapat mengurangi tindakan oportunistik manajemen dalam manajemen laba pada laporan keuangan sehingga IFRS diharapkan dapat meningkatkan keterandalan dan menghasilkan informasi keuangan lebih berkualitas.

Meskipun IFRS dianggap mampu menghilangkan alternatif-alternatif bagi manajemen untuk memanipulasi laba dan dipercaya dapat meningkatkan keterandalan dan menghasilkan informasi keuangan lebih berkualitas, tetapi perlu diingat bahwa IFRS mengusung *principles based* atau berdasarkan pada prinsip, sedangkan GAAP adalah *rules based* atau berdasarkan aturan, yang memungkinkan orang untuk menerapkan prosedur akuntansi secara benar sesuai dengan aturan-aturan yang dijabarkan. *Principles based* lebih bersifat subjektif dan dapat memicu timbulnya masalah pada pelaporan keuangan. Misalnya saja ketika suatu aset dinilai oleh seorang *appraiser* seharga A, tetapi bisa jadi berbeda ketika dinilai oleh *appraiser* lain. Dengan adanya kemungkinan ini, auditor akan meminta lebih banyak informasi dan *judgment* yang tidak mustahil pula akan menimbulkan pertanyaan pada laporan keuangan auditan. Selain itu dengan ditinggalkannya prinsip *historical cost* atau nilai historis pada IFRS ini, manajemen akan dengan mudah merencanakan *earnings* dengan tujuan memperoleh laba yang diharapkan, dan tidak berfokus pada ketepatan/kebenaran informasi akuntansi.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa IFRS bukanlah mengurangi manajemen laba tetapi malah menyuburkan manipulasi laporan keuangan, memberikan kebebasan manajer melakukan manajemen laba karena akuntan diberi wewenang untuk menentukan suatu proses akuntansi sendiri. Oleh karena itu di sinilah dibutuhkan *professional judgment*. Menurut Bennet *et al.* (2006) *Principle-based standards* mensyaratkan *professional judgment* baik pada level transaksi maupun ada level laporan keuangan. Sehingga hal ini menjadikan IFRS menjadi lebih

fleksibel dan memberi keleluasaan akuntan untuk melakukan menggunakan professional judgment.

Sehingga dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa IFRS masih mengalami perdebatan di kalangan peneliti. Penelitian dilakukan oleh Chen *et al.*, (2010) tentang peran IFRS terhadap peningkatan kualitas akuntansi di Eropa. Penelitian ini menggunakan indikator *discretionary accrual* untuk mengukur manajemen laba, di mana manajemen laba tersebut adalah *proxy* dari kualitas akuntansi. Semakin rendah manajemen laba mengindikasikan bahwa akuntansi semakin berkualitas. Menggunakan analisis regresi, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa negara-negara yang mengadopsi IFRS memiliki angka *discretionary accrual* yang rendah, yang berarti juga kualitas akuntansinya lebih baik.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hong (2008), pada 654 perusahaan di China yang dahulu menggunakan *Chinese GAAP* kemudian bertransisi ke IFRS. Penelitian ini menghitung nilai absolut dari *discretionary accrual* untuk mengukur manajemen laba yang mencerminkan kualitas laporan keuangan. Di pasar China, laporan keuangan yang mengindikasikan “*bad news*” lebih informatif ketika disajikan dalam IFRS yang *principles based*. Dari sini didapatkan informasi bahwa penyajian laporan keuangan menggunakan IFRS membuat informasi perusahaan menjadi lebih berguna.

Cai *et al.*, (2008) meneliti tentang pengaruh IFRS dan pelaksanaannya dalam manajemen laba dengan meneliti lebih dari 100.000 perusahaan-tahun di 32 negara dari tahun 2000 sampai tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *earnings management* di negara yang mengadopsi IFRS menurun pada tahun-tahun terakhir. Hasil dari penelitian ini juga mengindikasikan bahwa negara dengan pelaksanaan IFRS yang lebih kuat memiliki tingkat

*earnings management* yang lebih rendah. Hasil ini tentu mendukung pendapat pendukung IFRS bahwa dengan diadopsinya IFRS, maka *earnings management* akan berkurang.

Penelitian berbeda tentang dampak diimplementasikannya IFRS terhadap menurunnya manajemen laba dilakukan di India. Sebuah penelitian dilakukan oleh Rudra dan Bhattacharjee (2011). Menurut Rudra dan Bhattacharjee (2011), India adalah salah satu negara dengan tingkat manajemen laba tertinggi di dunia. India yang juga sebagai *emerging market*, memberikan peluang untuk menguji apakah adopsi standar internasional berhubungan dengan manajemen laba yang lebih rendah. Meskipun demikian, penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena ternyata di negara berkembang di mana standar internasional diterapkan, cenderung lebih “mulus” dalam laba jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengadopsi IFRS. Kesimpulan ini tentu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu bahwa IFRS dapat meningkatkan kualitas laporan. Temuan ini dapat memberikan saran pada regulator untuk berpikir tentang efektivitas IFRS dalam mengurangi *opportunistic earnings management* di negara dengan ekonomi berkembang, seperti India khususnya, ketika standar akuntansi di India mengalami perubahan substansial dengan konvergensi IFRS secara bertahap.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dipandang perlu untuk melihat praktik manajemen laba sebelum dan sesudah konvergensi IFRS. Apakah praktik manajemen laba sebelum dan sesudah konvergensi IFRS mengalami perubahan dalam rangka peningkatan kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian ini fokus untuk melihat “Perbedaan Tingkat Praktik Manajemen Laba Sebelum dan sesudah koergensi IFRS pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI”. Penelitian ini akan dilakukan pada dua periode yaitu sebelum IFRS dan

sesudah konvergensi IFRS. Untuk periode sebelum konvergensi IFRS yaitu tahun 2009-2011 dan periode sesudah konvergensi IFRS yaitu tahun 2012-2014.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah adalah apakah terdapat perbedaan tingkat praktik manajemen laba sebelum dan sesudah konvergensi IFRS pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan perbedaan praktik manajemen laba sebelum dan sesudah konvergensi IFRS pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014

## 1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini dapat membantu siapapun untuk memahami ilmu terkait praktik manajemen laba serta kelebihan dan kekurangan dari implikasi konvergensi IFRS.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi buat peneliti lain yang ingin mengangkat atau mengembangkan masalah serupa.
3. Bagi Institusi terkait, penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan penilaian dan pertimbangan atas hubungan konvergensi IFRS dengan praktik manajemen laba.



## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan thesis ini dibagi dalam lima bab yang menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan pemaparan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
2. Bab II merupakan landasan teori berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian.
3. Bab III Merupakan metode penelitian berisi pemaparan mengenai variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini
4. Bab IV membahas hasil analisis data yang menjadi objek penelitian yang dimulai dari pengumpulan data, pengujian data dan analisis data yang telah dikumpulkan serta pembahasan yang mendalam atas hasil penelitian.
5. Bab V merupakan penutup dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari analisis hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan perbaikan dari kelemahan-kelemahan yang ditemui dari hasil penelitian.



